



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

Jalan Mahkota Kuala Meurisi Telepon 0654- 2210099, Faksimile 0654- 2210096
C A L A N G

NOTULEN RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

Rapat	: BADAN LEGISLASI
Jenis Sifat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Jum'at, 19 Mei 2023
Tempat	: Gedung DPRK Aceh Jaya
Acara	: Rapat Badan Legislasi DPRK Aceh Jaya terkait Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah.

Waktu Pembukaan dan Penutupan	: 09.30 s.d Selesai
Pimpinan Plt. Sekretaris DPRK	: MAWARDI WAHID : IRMA HANUM,SH
Anggota Dewan Yang Hadir	1. MUHAMMAD ALI,S.Sos 2. H. DASRIL A.RAHMAN IB 3. AIZUDDIN, S.Sos.,M.Si 4. AMIRUDDIN.Z,SE
Eksekutif Yang Diundang	<ul style="list-style-type: none">• Kabag. Hukum• Kabid. KPSDM• Kabid. LITBANG• Perancang Perundang-Undangan• Analis Pemanfaatan IPTEK• Analis Penelitian dan Pengembangan

Jalannya Rapat	<ul style="list-style-type: none">➢ Rapat dibuka Oleh Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Mawardi Wahid.➢ Ketua Badan Legislasi Mawardi Wahid<ul style="list-style-type: none">• Dipersilahkan bagi pemrakarsa untuk menjelaskan apa saja yang menjadi ruang lingkup dari qanun inovasi daerah.➢ Kabid. KPSDM<ul style="list-style-type: none">• Adapun dasar hukum terkait penyusunan qanun inovasi daerah yaitu :<ul style="list-style-type: none">- UU 23/2014- UU 11 Tahun 2019- UU 6 Tahun 2023- PP 38 Tahun 2017Tujuan<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.- Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Efisien dan Efektif.- Mempercepat terwujudnya Visi Misi.➢ Kabid LITBANG<ul style="list-style-type: none">• Telah melakukan Sosialisasi ke 172 Gampong, 98 SD, 36 SMP, seluruh Puskesmas.• Masyarakat secara Umum masih belum bisa menerima adanya perubahan.• Diperlukan payung Hukum untuk sharing tanggungjawab.• Salah Satu Inovasi Daerah yang telah mendapat Penghargaan dari Kemendagri yaitu SUS (SAWEU UREUNG SAKET).➢ Ketua BANLEG<ul style="list-style-type: none">• Terkait Kriteria Inovasi agar dapat ditangguhkan dengan syarat sesuai dengan Syariat Islam.• Ditambah Pemerintah Mukim sebagai salah satu
-----------------------	---

	<p>pihak yang berhak Mengusulkan Inovasi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wakil Ketua BANLEG <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang menjadi pihak pengawasan terhadap suatu inovasi? • Apakah dalam suatu inovasi dimungkinkan untuk adanya keterlibatan pihak ketiga ? ➤ Kabid Litbang <ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan peran pengawasan dibebankan pada pihak pengusul Inovasi. • Keberlanjutan sebuah inovasi merupakan tanggung jawab pengusul inovasi. ➤ Kabid KPSDM <ul style="list-style-type: none"> • Terkait dengan kriteria tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah. • Penambahan dengan asas dapat ditambahkan dengan memperhatikan muatan lokal • Penambahan redaksi pemerintah mukim nantinya juga akan ditambahkan dalam draft. • Untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas implementasi inovasi daerah diperlukan adanya payung hukum untuk inovasi daerah itu sendiri. ➤ Ketua Banleg <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana Terkait dengan penyesuaian inovasi dengan RPJMK? Karena RPJMK bersifat 5 Tahunan sedangkan inovasi muncul setiap tahun. • Diperjelas redaksi Qanun terkait dengan kesesuaian suatu inovasi daerah yang diintegrasikan dengan RPJMK. ➤ Kabid Litbang <ul style="list-style-type: none"> • Dalam tataran Pusat/Kemendagri, terkait kesesuaian inovasi dengan RPJMK, daerah hanya perlu membuktikan adanya kesesuaian dengan Visi dan Misi. • Tersebutkan kata Inovasi dalam visi dan misi, dapat menjadi garansi atau adanya kesesuaian yang menciptakan Inovasi Daerah. ➤ Kabag Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Dalam RPJM itu sendiri tidak memuat secara rinci apa yang menjadi Inovasi Daerah tersebut. • Menciptakan Inovasi Daerah dapat dijalankan dan dilakukan dengan sesuai Sasaran dan target RPJMK. ➤ Ketua Badan Legislasi <ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan agar Qanun ini juga dapat menjadi landasan bagi Gampong untuk menciptakan Inovasi Daerah bagi Gampong itu sendiri. ➤ Kabid Litbang <ul style="list-style-type: none"> • Setiap adanya inovasi baru akan menjadi milik/hak paten dari pengusul itu sendiri. ➤ Perancang Perundang-Undangan <ul style="list-style-type: none"> • Mengatur adanya masa evaluasi terkait keberlangsungan sebuah inovasi daerah, dilanjutkan, dihentikan atau dilanjutkan dengan rekomendasi. ➤ Rapat ditutup Oleh Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Jaya Mawardi Wahid.
Kesimpulan dan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Diskor dan dilanjutkan pada waktu yang akan ditentukan kembali. • Rapat Badan Legislasi Ditutup Pukul 12.30 WIB.

BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH JAYA
KETUA,

MAWARDI WAHID